

**STUDI ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN PONDOK PESANTREN MAHIMUL MUNIR
BOLOR GEJEK DESA PANDAN INDAH, DI KECAMATAN
PRAYA BARAT DAYA**

Muhammad Masdar Farid Marantika

Mahasiswa IAIQ Bagu , Lombok Tengah, NTB

*Penulis Korespondensi: masdar@gmail.com

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaporan keuangan pondok pesantren Pondok Pesantren Mahimul Munir Kecamatan Praya Barat dan untuk mengetahui alasan kenapa yayasan pondok pesantren Mahimul Munir di Kecamatan Praya Barat belum melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren.

Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan infroman dilakukan dengan metode *pusposive sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui tentang keuangan pondok pesantren. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Mahimul Munir Kecamatan Praya Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Pondok Pesantren Mahimul Munir di Kecamatan Praya Barat belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Ada beberapa bentuk pertanggungjawaban keuangan yang ditemui saat melakukan penelitian Pondok Pesantren Mahimul Munir hanya menggunakan buku kas sederhana yang mencatat penerimaan kas dan pengeluaran kas, pelaporan keuangan secara lisan kepada penyandang dana, pelaporan keuangan melalui dokumentasi (foto) bukti nyata penggunaan dana yang dikirimkan kepada penyandang dana melalui aplikasi *chatting online* WhatsApp, dan melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sederhana yang dilengkapi dengan nota dan kwitansi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Keuangan, Alasan, Pedoman Akuntansi Pesantren

Article history:

STIS Darussalam Bermi

Pendahuluan

Data Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia adalah sebanyak 28.984 Pondok Pesantren dengan 4.290.626 santri (Data *Education Management Information System 2015/2016*)¹, merupakan sebuah potensi yang sangat strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia. Setidaknya ada tiga hal yang merupakan wadah kestrategisan pondok pesantren, yaitu:

1. Lembaga Keagamaan;
2. Lembaga Pendidikan;
3. Lembaga Sosial.

Tiga wadah ini yang akan mengembangkan dan membesarkan pondok pesantren di Indonesia. Pondok pesantren memiliki peran yang penting dalam perkembangan keberagaman di Indonesia. Keberadaan pondok pesantren dan peran aktifnya telah ada sejak dulu. Pondok pesantren telah banyak berkembang melahirkan para ilmuwan, pejuang, pemimpin, birokrat, dan lainnya yang berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.

K.H. Hasyim Asy'ari, seorang pendiri organisasi Nahdatul Ulama dan Pondok Pesantren Tebuireng. Pernah juga menjabat sebagai Ketua Majelis Islam A'la Indonesia dan Ketua Masyumi. Tokoh yang kedua adalah K.H. Wahid Hasyim, anggota BPUPKI termuda, salah satu tokoh penandatanganan Piagam Jakarta, penasihat Panglima Sudirman, Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama, dan pernah juga menjabat sebagai Menteri Agama

Republik Indonesia.

Tokoh ketiga adalah Dr.(H.C)K.H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang pernah menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999-2001. Dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Untuk

¹ Rizky, Ade Diyani, Yazid Yud Padmono. 2013. Analisis Penerapan PSAK No.45 pada Yayasan Masjid Al Falah Subaya. *Jurnal Riset dan Ilmu Akuntansi*, Vol. 2 No.7. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya, hlm. 76

menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Oktober 2019 disahkan Undang- undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren oleh Presiden Joko Widodo.

Peran penting yang dimiliki pondok pesantren mempengaruhi perkembangan keberagaman di Indonesia. Banyak peranan yang telah ditunjukkan oleh pondok pesantren, namun masih terdapat permasalahan internal dan eksternal khususnya dalam hal sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan pondok pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pondok pesantren.²

Laporan keuangan pada pondok pesantren ini dapat menjadi alat pertanggungjawaban pondok pesantren atas sumber daya yang telah diterima dari para *stakeholder* pesantren tersebut. Walaupun pesantren merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada laba (nirlaba) namun penting adanya laporan keuangan yang baik dan benar sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pondok pesantren.

Bank Indonesia (BI) bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan standar baru dalam penyusunan laporan keuangan pondok pesantren yaitu Pedoman Akuntansi Pesantren yang dikeluarkan pada tahun 2018. Laporan keuangan pesantren yang lengkap menurut Pedoman Akuntansi Pesantren terdiri atas:

1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan aktivitas
3. Laporan arus kas;
4. Catatan atas laporan keuangan.

Penelitian dari Solikhah, tentang fenomenan kualitas laporan keuangan pesantren. Kesimpulan yang didapat hampir dipastikan bahwa belum ada yayasan pendidikan yang memahami dan menggunakan PSAK No 45. Karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu

² Murdayanti, Yunika, Dita Puruwita. 2019. Kompetensi SDM Keuangan dan Akuntabilitas Pesantren. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 7 No. 1. Universitas Negeri Jakarta, hlm. 31

yang penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola pondok pesantren.³

Pondok pesantren Mahimul Munir adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah. Pada pondok pesantren tipe ini para siswa atau disebut santri tinggal di asrama yang disediakan yayasan pondok pesantren sekaligus menempuh pendidikannya di sana. Jadi, pengelolaan manajemen pondok pesantren Mahimul Munir ini lebih luas daripada tipe pondok pesantren lainnya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pertanggungjawaban keuangan pondok pesantren dengan judul “Studi Analisis laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pondok Pesantren Mahimul Munir Bolor Gejek Desa Pandan Indah, di Kecamatan Praya Barat Daya”.

Pembahasan

A. Pengelolaan Pelaporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Mahimul Munir

Pondok pesantren merupakan salah satu bentuk yayasan yang tidak hanya aktif bergerak dalam bidang pendidikan, melainkan aktif bergerak juga dalam bidang keagamaan dan bidang sosial. Begitu juga dengan yayasan pondok pesantren Mahimul Munir yang berada di desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat. yayasan pondok pesantren ini memiliki lembaga pendidikannya masing-masing seperti Taman Kanak-kanak (TK) atau *Raudhatul Atfhal* (RA), *Madrasah Tsanawiyah* (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Yayasan pondok pesantren Mahimul Munir yang berada di desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat juga melakukan kegiatan dakwah islam baik di kawasan pondok pesantren maupun di luar kawasan pondok pesantren. Dakwah islam ini terkadang

³ Solikhah, Yudha Aryo Sudiby, Dewi Susilowati. 2019. Fenomena Kualitas Laporan Keuangan Pesantren Berdasar Pedoman Akuntansi Pesantren dan Psak No 4. *Journal of Accounting and Bussiness*. Universitas Jenderal Soedirman.

berlangsung di masjid-masjid ataupun musholla. Dakwah islam ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang islam dan untuk menyebarkan ajaran islam. Dakwah islam ini dilakukan pimpinan yaitu Tuan Guru Haji Mahimul Munir, M. Pd.I yang tidak hanya dilakukan di desa Pandan Indah tapi di luar desa Pandan Indah. Selain dakwah islam ini, yayasan pondok pesantren ini juga melakukan kegiatan mengaji baik itu untuk santri pondok pesantren maupun anak-anak yang ada disekitar yayasan pondok pesantren. Tentu saja kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam mempelajari dan lebih memahami Al-Qur'an.

Dalam bidang sosial, yayasan pondok pesantren ini melakukan beberapa kegiatan sosial seperti gotong royong, majelis ta'lim, membuat acara sosial yang bekerjasama dengan masyarakat dan lain sebagainya contohnya mengadakan acara saat perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Selain kegiatan ini, yayasan pondok pesantren ini memiliki tempat pelatihan keterampilan untuk para santrinya maupun untuk masyarakat sekitar seperti pelatihan komputer. yayasan pondok pesantren ini mengadakan lembaga pendidikan formal dengan tidak memungut biaya apapun dari santrinya, hal ini juga membuktikan bahwa pondok pesantren memiliki nilai sosial yang tinggi untuk membantu meringankan beban masyarakat menengah ke bawah yang tidak bisa untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Untuk melakukan semua kegiatan ini, tentu saja yayasan pondok pesantren Mahimul Munir yang berada di Pandan Indah Kecamatan Praya Barat membutuhkan pendanaan yang berasal dari berbagai sumber. Setelah itu pengelolaan pendanaan yayasan pondok pesantren tersebut harus dikelola dengan baik agar kegiatan maupun operasionalnya pesantren sehari-hari dapat terlaksanakan.

Berikut model pengelolaan dana yayasan pondok pesantren Mahimul Munir Bolor Gejek Desan Pandan Indah:

Tabel. 1⁴

Pengelolaan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Mahimul Munir

NAMA PESANTREN	SUMBER DANA DAN MODEL PENGELOLAAN
Yayasan Pondok Pesantren Mahimul Munir	<ol style="list-style-type: none">1. Dana BOS dari pemerintah akan masuk ke setiap rekening lembaga pendidikan yang ada di bawah yayasan dan menjadi pertanggungjawaban dari kepala lembaga. Setiap lembaga pendidikan akan mengelola dana tersebut sesuai dengan RPU dan RAB yang sudah disetujui oleh pimpinan dan pengurus yayasan. Dana yang masuk diserahkan kepada yayasan untuk digunakan perbaikan dan kegiatan-kegiatan pondok lainnya2. Dana BOS ini akan digunakan untuk pembelian seragam siswa, honor guru dan lain3. Sedangkan dana yang diterima yayasan diluar dana BOS akan digunakan untuk kebutuhan yayasan. Biasanya digunakan untuk perbaikan gedung, pembangunan gedung dan memenuhi kebutuhan yayasan lainnya.

Berdasarkan penjabaran pada Tabel diatas maka pengelolaan keuangan yayasan pondok pesantren Mahimul Munir yaitu sistem yang tidak satu pintu. sistem yang tidak satu pintu yaitu pengelolaan keuangan yayasan dan pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diserahkan kepada masing-masing lembaga pendidikan yang bernaung di bawah yayasan. Dimana dalam sistem ini bendahara yang ada di yayasan pondok pesantren juga dibedakan menjadi bendahara umum yayasan dan bendahara untuk setiap lembaga pendidikan yang ada di yayasan.

⁴ Wawancara dengan Mahimul Munir, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mahimul Munir Bolor Gejek Desa Pandan Indah, 22 Agustus 2020, Pukul 08:30 WITA.

Untuk pengelolaan keuangan yang berasal dari non dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti dana dari swadaya masyarakat dan untuk pembangunan yayasan pondok pesantren akan menjadi tanggung jawab yayasan secara langsung. Sedangkan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga pendidikan dalam hal ini yaitu kepala sekolah dan bendahara sekolah.

Dalam hal ini, untuk setiap penerimaan dan pengeluaran uang selain dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka bendahara yayasan akan melakukan pertanggungjawaban kepada pimpinan yayasan. Sedangkan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bendahara masing-masing lembaga pendidikan akan melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sesuai dengan pedoman yang sudah diberikan oleh pemerintah.

Dana yang diterima oleh yayasan pondok pesantren akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasaranan seperti pembuatan gedung baru maupun renovasi gedung yang ada di yayasan. Sedangkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan digunakan oleh setiap lembaga pendidikan untuk kegiatan operasional seperti honor guru, pembelian alat tulis kantor (ATK), pembelian buku-buku dan beberapa keperluan lain yang sudah diatur oleh pemerintah. Karena untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemerintah sudah memberikan pedoman penggunaan dana yaitu untuk apa saja dana tersebut boleh dan tidak boleh digunakan, untuk bentuk pelaporan keuangannya juga sudah diatur bentuknya oleh pemerintah. Semua tentang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini diatur dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).⁵

B. Pencatatan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Mahimul Munir

Menurut Soemarso S.R, pelaporan atau pencatatan berarti mengumpulkan data secara kronologis. Pencatatan (*recording*)

⁵ Wawancara dengan Mahimul Munir, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mahimul Munir Bolor Gejek Desa Pandan Indah, 22 Agustus 2020, Pukul 08:30 WITA.

transaksi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya ditulis dengan pensil atau pena menyetik pada peralatan komputer, membuat lubang pada kartu pons (*punch card*) atau memberi tanda-tanda tertentu.⁶

Berdasarkan pernyataan ini dapat ditarik benang merah bahwa proses pencatatan atau pelaporan transaksi akuntansi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda sesuai dengan yang diinginkan oleh setiap yayasan pondok pesantren. Oleh karena itu, Proses pelaporan yang dilakukan oleh yayasan pondok Pesantren Mahimul Munir yaitu:⁷

- a. pelaporan kas keluar masuk saja karena setiap penggunaan dana harus sesuai dengan RPU dan RAB sehingga pelaporan untuk apa saja dana dipakai sangat penting bagi yayasan. pelaporan ini dilakukan di buku kas berupa buku tulis *hard cover* yang berupa pembukuan kas keluar dan pembukuan kas masuk serta belum dilakukan secara terkomputerisasi.
- b. Dilakukan pelaporan tapi tidak dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan yayasan lebih banyak menggunakan dana swadaya sehingga pelaporan tidak dirasa terlalu penting untuk dilakukan. Untuk dana BOS dilakukan pencatatan yang baik dan semua buktinya disimpan karena untuk dana ini wajib dilakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah. Belum dilakukan pelaporan secara terkomputerisasi dan teratur karena yayasan merasa tidak wajib melakukan hal tersebut sehingga hal ini membuat yayasan sulit untuk mengetahui seluruh informasi keuangan yayasan dalam membuat laporan keuangan. Yayasan tidak mengetahui dengan jelas sudah berapa dana swadaya yang dikeluarkan karena tidak dicatat dengan baik.
- c. **Hambatan atau kendala pelaporan keuangan pondok pesantren belum melakukan pelaporan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren**

⁶ Soemarso, S.R. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, hlm. 56

⁷ Wawancara dengan Mahimul Munir, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mahimul Munir Bolor Gejek Desa Pandan Indah, 22 Agustus 2020, Pukul 08:30 WITA.

Pedoman Akuntansi Pesantren merupakan standar baru dalam penyusunan laporan keuangan pondok pesantren yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pedoman Akuntansi Pesantren ini dikeluarkan pada tahun 2018. Laporan keuangan pesantren yang lengkap menurut Pedoman Akuntansi Pesantren terdiri atas: Laporan posisi keuangan, Laporan aktivitas, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan. Yayasan pondok pesantren Mahimul Munir Pandan Indah Kecamatan Praya Barat belum ada yang menggunakan Pedoman Akuntansi Pesantren ini yang utuh.

Ada beberapa alasan kenapa yayasan pondok pesantren Mahimul Munir Pandan Indah di Kecamatan Praya Barat ini belum menggunakan Pedoman Akuntansi Pesantren, yaitu (1) yayasan pondok pesantren belum mengetahui tentang adanya Pedoman Akuntansi Pesantren, (2) belum ada sumber daya manusia (SDM) yang memadai, (3) belum ada donatur tetap, (4) dana berasal dari dana pribadi sehingga yayasan pondok pesantren merasa tidak harus melakukan pertanggungjawaban kepada siapapun, dan (5) karena tidak ada tuntutan dari donatur agar yayasan pondok pesantren membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren.⁸

Di Yayasan pondok pesantren Mahimul Munir Pandan yang menjadi alasan utama kenapa belum menggunakan Pedoman Akuntansi karena pesantren belum mengetahui tentang adanya Pedoman Akuntansi Pesantren dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap yayasan pondok pesantren. Disamping itu karena tidak memiliki buku kas sederhana untuk yayasan. Mereka hanya melakukan pencatatan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh masing-masing lembaga sekolah.

Hal ini dikarenakan yayasan pondok pesantren ini belum memiliki sistem yang baik di yayasannya dan dikarenakan faktor kepercayaan. Maksudnya, kebanyakan transaksi penerimaan atau

⁸ Wawancara dengan Mahimul Munir, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mahimul Munir Bolor Gejek Desa Pandan Indah, 22 Agustus 2020, Pukul 08:30 WITA.

pengeluaran dana yang ada hanya dilaporkan secara lisan kepada pimpinan yayasan dan pimpinan yayasan mempercayakan kepada pengurus untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan kebutuhan tanpa menuntut untuk dibuatkan suatu pencatatan. Dari pihak penyandang dana pun tidak menuntut yayasan untuk melakukan pelaporan keuangan sehingga proses pencatatan ini belum dilakukan. Alasan lain karena belum melakukan pencatatan atau pelaporan adalah karena dana yang mereka kelola selain dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berasal dari dana swadaya pimpinan dan pengurus yayasan sehingga proses pencatatan ini juga dirasa tidak terlalu penting untuk dilakukan. Hal ini didukung oleh beberapa pernyataan narasumber yang sudah dilakukan wawancara.

“Apabila dari pemerintah atau instansi terkait yang membutuhkan SPJ baru dicatat penerimaan dan pengeluarannya.” (Drs. TGH. Mahimul Munir, M.Pd.I selaku Pimpinan/Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Mahimul Munir).

Senada dengan apa yang disampaikan Adiam selaku Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Dhiyaul Furqon *“Tidak selalu karena tidak membuat laporan keuangan. Hanya dilaporkan lewat WA (WhatsApp Aplikasi chatting online) kepada donatur”* (Adiam selaku Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Mahimul Munir).

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaporan keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bendahara masing-masing lembaga pendidikan akan melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sesuai dengan pedoman yang sudah diberikan oleh pemerintah.

Sedangkan untuk dana selain Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melakukan pertanggungjawaban kepada pimpinan yayasan.

2. Kendala pelaporan keuangan pondok pesantren Di Yayasan pondok pesantren Mahimul Munir Pandan Indah yaitu pesantren belum mengetahui tentang adanya Pedoman Akuntansi Pesantren dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap yayasan pondok pesantren. Disamping itu karena tidak memiliki buku kas sederhana untuk yayasan. Mereka hanya melakukan pencatatan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh masing-masing lembaga sekolah.

Daftar Pustaka

Arifin, Miftahol. 2016. Manajemen Keuangan Pondok Pesantren. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam, Vol.4 No.2*. STIT Al-Alkarimiyyah Sumenep.

Arifin, Zainal. 2014. Pertanggungjawaban Keuangan Pondok Pesantren: Studi pada Yayasan Nazhatut Thullab. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol 3 No11*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.

Atufah, Devi Intan, Norita Citra Yuliarti, Dania Pupitasari. 2018. Penerapan PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah. *International Journal of Social Science and Bussiness, Vol.2 No. 3*. Universitas Muhammadiyah Jember.

Biduri, Sarwenda, Ruci Arizanda Rahayu, Ilmiatul Mukarromah. 2019. Implementasi Psak No. 45 Pada Penyusunan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Demi Terciptanya Transparansi dan Akuntabilitas. *Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah Paper*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Fanni, Nurul Ihsanil.

2019. Pelaporan Keuangan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren
Darrul Muttaqien NUPerian Ditinjau Dari Pedoman Akuntansi
Pesantren. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas BAGU.